

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, dampak *Corona virus disease* (Covid-19) yang tengah melanda hampir semua penjuru dunia sedang menghadapi krisis kesehatan global dan sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk Indonesia. Pasca berganti status menjadi negara maju, Indonesia mengalami banyak tekanan di berbagai aspek kehidupan jutaan masyarakat beriringan dengan pesatnya penyebaran virus Covid-19. Beberapa sektor utama kekuatan ekonomi yang terdampak seperti sektor negara, sektor swasta dan sektor koperasi. Menurunnya berbagai kegiatan, menyebabkan rendahnya kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya koperasi merupakan suatu lembaga yang sangat dibutuhkan. Hal ini dikarenakan koperasi dapat menjadi mitra Negara dalam menggerakkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Kelangsungan hidup koperasi dalam kenyataannya harus didukung pula oleh sistem pengelolaan dengan manajemen yang handal, rasional, efektif dan efisien sehingga kehadirannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1) menjelaskan bahwa bukan kemakmuran orang perseorangan yang diutamakan melainkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama dan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Koperasi salah satu sektor kekuatan ekonomi dan diharapkan menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia, karena koperasi merupakan badan usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi Bangsa Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016: “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan.”. Tujuan utama dari suatu koperasi adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yaitu dengan memaksimalkan laba atau keuntungan untuk mensejahterakan anggota.

Laporan keuangan merupakan suatu dasar informasi untuk menyusun dan mengevaluasi mengenai berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan pada periode yang telah lalu, serta untuk menyusun perencanaan dan menentukan arah kegiatan perusahaan di periode yang akan datang. Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan yang disusun harus relevan, dapat dimengerti, memiliki daya uji, netral, dan tepat waktu. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan antar pos dan antar periode akuntansi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Penilaian kesehatan koperasi dilakukan untuk mengukur kinerja koperasi dalam menjalankan usahanya dengan memperhatikan aspek keuangan dan aspek manajerial. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi, maka akan membantu pihak-pihak tertentu dalam mengambil keputusan. Analisis tingkat kesehatan koperasi dapat dihitung berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sebuah perusahaan atau koperasi dikatakan sehat bila perkembangan hasil usahanya semakin meningkat. Dalam menjalankan kegiatannya koperasi membutuhkan laporan keuangan sebagai tolak ukur dalam roda perputaran keuangan. Pada umumnya laporan keuangan koperasi dibukukan dalam laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi yang dibagikan kepada setiap anggota koperasi pada Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan keuangan koperasi dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan koperasi dalam mencapai tujuan bersama.

Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang merupakan koperasi yang mempunyai banyak unit usaha seperti simpan pinjam, toko, borongan dan leveransir, kepil, air minum isi ulang, cleaning service, fotocopy, sewa kendaraan, permakanan, bukan anggota lainnya, dan penyertaan modal pada PT Koppel Mandiri Bersama. Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang berlokasi di Jalan Blinyu Lawang Kidul Palembang didirikan pertama kali berdasarkan Rapat pembentukan tanggal 16 Juni 1977 dan kemudian di sahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Koperasi Wilayah Sumatera Selatan pada tanggal 12 April 1978 badan hukum No. 4018/BH/II/78 dengan nama Koperasi Karyawan Maritim. Berdasarkan data yang diperoleh, koperasi ini memiliki anggota sebanyak 399 anggota per tahun 2021 serta telah memberikan banyak pinjaman kepada para anggotanya dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan anggotanya. Rincian status laporan keuangan dan penilaian kinerja kesehatan Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang disajikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1

**Tabel Status Laporan Keuangan & Penilaian Kinerja Kesehatan
Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang**

No.	Keterangan	2019	2020	2021
1.	Status Laporan Keuangan	Audited	Audited	Audited
2.	Penilaian Kinerja Kesehatan	Belum ada	Belum ada	Belum ada

Sumber : Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang

Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang termasuk koperasi yang masih tertutup, audit yang dilakukan masih termasuk audit internal karena pengguna laporan keuangan masih sebatas pengurus saja. Laporan keuangan telah melalui proses *auditing*, namun belum pernah dievaluasi dan dinilai tingkat kesehatan kinerjanya sehingga pengurus tidak mengetahui status koperasi apakah sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 “keadaan suatu koperasi bisa dilihat dari 7 aspek yakni : aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian serta pertumbuhan, lalu aspek jati diri koperasi”. Pada penilaian kesehatan koperasi ditinjau berdasarkan tujuh aspek yang terdiri dari beberapa komponen rasio keuangan yaitu guna mengetahui seberapa sehatnya koperasi dalam melaksanakan aktivitas usaha dan sesuai hasil dari penilaian ketujuh aspek tersebut, diperoleh skor secara keseluruhan yang dipergunakan untuk memutuskan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Dengan menggunakan penilaian berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016, maka diharapkan dapat membantu dalam mengetahui kelemahan yang ada sehingga dapat digunakan sebagai alat peningkatan dimasa depan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat laporan akhir dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi pada Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang Menurut Peraturan Menteri Koperasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diketahui bahwa Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang belum menilai tingkat kinerja kesehatan. Selanjutnya permasalahan tersebut dapat penulis rincikan sebagai berikut:

1. Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang belum melakukan penilaian secara khusus mengenai tingkat kinerja kesehatan pada laporan auditing.
2. Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang belum memperhitungkan penilaian tingkat kinerja kesehatan berdasarkan Peraturan

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi.

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam pembahasan permasalahan, agar penyusunan serta penulisan laporan akhir ini terfokus, tidak meluas dan tidak menyimpang dari permasalahan ada, maka penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasan pada penilaian tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP yang meliputi: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan serta aspek jati diri koperasi pada Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang selama 3 (tiga) yaitu tahun 2019, tahun 2020, dan tahun 2021.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan terkait belum adanya penilaian tingkat kinerja kesehatan pada Koperasi Karyawan Pelabuhan II Cabang Palembang, maka tujuan dari penulisan Laporan Akhir ini dapat penulis rincikan sebagai berikut:

1. Menilai tingkat kinerja kesehatan pada laporan auditing dengan cara perhitungan khusus berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016.
2. Memperhitungkan tingkat kinerja kesehatan untuk melihat tingkat kinerja kesehatan telah sesuai standar penilaian yang telah ditetapkan atau belum.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan laporan akhir ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penyusunan laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya yang berkaitan di bidang mata kuliah analisis laporan keuangan dan bidang ilmu sejenis.

2. Bagi KOKARPEL Indonesia II Cabang Palembang

Hasil penyusunan laporan akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran, informasi dan pertimbangan dalam mengevaluasi kondisi dan tingkat kesehatan koperasi di masa yang akan datang, khususnya tiga tahun periode terkahir.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan referensi atau acuan untuk mahasiswa/i di Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Akuntansi di masa yang akan datang dalam menyusun laporan akhir di bidang mata kuliah analisis laporan keuangan agar terus dapat dikembangkan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena metode ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya. Untuk memperoleh data seperti macam metode, dalam penelitian

dapat digunakan berbagai macam metode menurut Sudaryono (2018:205-216) di antaranya sebagai berikut :

1. Angket

Angket atau kuisisioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspons oleh responden. Dengan kata lain, angket (*questionnaire*) adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada *orang lain bersedia memberikan respons (responden)* sesuai dengan permintaan pengguna.

2. Observasi

Pengamatan atau *observation* yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.

4. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.

Sehubungan dengan penulisan laporan akhir ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan laporan akhir adalah teknik angket/ kuisisioner dan dokumentasi, yaitu dengan melakukan

pengumpulan data-data yang dibutuhkan kepada Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

1.5.2 Sumber Data

Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis merujuk pada Siregar (2013:528), data dapat dibedakan dengan cara memperolehnya yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya.

Bedasarkan sumber pengumpulan data, maka penulis menggunakan sumber data primer yaitu neraca dan laporan laba/rugi selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021, sejarah singkat, struktur organisasi dan pembagian tugas serta aktivitas usaha Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan Akhir

Untuk menghasilkan laporan akhir ini yang lebih terarah dan sesuai dengan pokok pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi pada perusahaan, maka secara garis besar akan dikemukakan kerangka penulisan secara sistematis, antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan teori-teori dan beberapa buku referensi yang berhubungan dengan pembahasan yang dapat

dijadikan dasar perbandingan dalam penulisan laporan akhir ini seperti Koperasi, Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, Sisa Hasil Usaha (SHU), Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016, Penilaian Kesehatan Koperasi, dan Penetapan Kesehatan Koperasi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini, penulis akan mengartikan gambaran umum mengenai objek dalam penulisan laporan akhir ini yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang, visi, misi dan misi Koperasi, struktur organisasi dan uraian tugas, aktivitas usaha serta laporan keuangan pada Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis laporan keuangan Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang menggunakan teknik analisis penilaian tingkat kesehatan dan penetapan tingkat kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016 selama tiga tahun terakhir dari periode tahun 2019 – 2021.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup dari laporan akhir, penulis akan mengemukakan dan kesimpulan dari hasil analisis yang dibuat pada bab sebelumnya dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang untuk masa yang akan datang dalam menjelaskan aktivitas usahanya.